



## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan

Hilen Julianti<sup>1</sup>, Fitri Agustina<sup>2</sup>, Yaumil Khoiriyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan. Variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah dan leverage sedangkan variabel dependen yang dipakai dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non probability sampel dengan teknik cluster random sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi lampung. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan program analisis statistika yaitu Statistical Program For Social Science (SPSS). Hasil penelitian ini menemukan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan ukuran pemerintah daerah dan leverage tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

### ABSTRACT

This research aims to determine the influence of local original income, balancing funds, regional government size, leverage on financial performance. The independent variables used in this research are local revenue, balancing funds, regional government size and leverage, while the dependent variable used in this research is financial performance. This type of research is quantitative research. The data source used in this research is secondary data. The sampling method in this research is non-probability sampling with cluster random sampling technique. The population in this study were all districts/cities in Lampung province. The data analysis method used in this research uses a statistical analysis program, namely the Statistical Program For Social Science (SPSS). The results of this study found that regional original income and balancing funds had a significant effect on financial performance, while regional government size and leverage had no significant effect on financial performance.

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



### Info Artikel

#### *Riwayat Artikel:*

Diterima 07 Maret 2024

Direvisi 27 April 2024

Revisi diterima 20 April 2024

#### *Kata Kunci:*

Balancing Fund, Financial Performance, Regional Government Size, Leverage, Regional Original Income.

#### *Penulis Koresponden:*

Fitri Agustina  
Institut Informatika Dan Bisnis  
Darmajaya  
Bandar Lampung, Indonesia  
[fitriagustina@darmajaya.ac.id](mailto:fitriagustina@darmajaya.ac.id)

**How to Cite:** Julianti, et al. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan. *ANALYSIS: Accounting, Management, Economics, and Business*, 2(2) 141-152. <https://doi.org/10.56855/analysis.v2i2.1100>

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan tugas roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar tercipta pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya konkrit pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Standar akuntansi ini diatur dalam peraturan pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005. Dalam kerangka konseptual standar akuntansi pemerintah salah satu prinsip akuntansi adalah pengungkapan lengkap full disclosure, dimana laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi-informasi yang berguna bagi pengguna laporan baik pada lembar muka laporan keuangan ataupun pada catatan atas laporan keuangan (CALK) (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cara dalam meningkatkan rasio kemandirian dalam suatu pemerintah daerah. Salah satu pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah pengukuran kinerja keuangan (Sari, 2016).

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran di daerah mereka masing-masing. Namun kenyataannya, masih banyak pengangguran pada kabupaten dan kota provinsi Lampung. Dapat dilihat fenomena dari data BPS, kabupaten dan kota yang paling tinggi tingkat pengangguran terbuka ada pada kota Bandar Lampung pada tahun 2021 dengan persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,85%. Pada tahun 2017-2019 sempat turun dan kembali naik lagi pada tahun 2020-2021 dikarenakan pandemi covid-19 dan mengakibatkan para pekerja yang di PHK dan ada juga sebagian karyawan dan pekerja yang kerja dirumah atau biasa disebut WFH (Work From Home).

Penurunan yang terjadi baik pada Pendapatan transfer maupun PAD berdasarkan data yang diperoleh dari catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung, realisasi PAD Kota Bandar Lampung mengalami penurunan yang cukup drastis yang diakibatkan karena Pandemi Covid 19 yang mempengaruhi sektor perekonomian terutama sektor usaha dan jasa. Hal ini membuat para pengusaha merugi dan hal ini tentunya berdampak pada turunnya jumlah pajak dan retribusi daerah yang

diterima pemerintah daerah. Hal ini membuat kinerja keuangan daerah kota/kabupaten di provinsi Lampung terlihat menurun (Lampung, 2021).

Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pertumbuhan nilai tambah yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong akan adanya perbaikan infrastruktur daerah, infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD dan intergovernmental revenue juga menambah belanja modal pemerintah daerah tersebut (Prastiwi & Aji, 2020). Halim, (2013) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, salah satunya dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri. kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Sehingga dapat diketahui tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan daerahnya.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dana perimbangan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jika realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan yang diterima daerah, maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah untuk menutupi kekurangan belanja daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat akan memperlihatkan semakin kuat Pemerintah Daerah bergantung kepada Pemerintah Pusat agar dapat memenuhi kebutuhan daerahnya.

Ukuran pemerintah daerah bisa menjadi faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila suatu daerah memiliki ukuran yang besar, maka tuntutan masyarakat, akan akuntabilitas akan semakin besar sehingga akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintah suatu daerah yang dapat diukur melalui total asset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas yang menyatakan ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total asset memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Kemudian faktor terakhir yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah leverage. Leverage merupakan pinjaman modal atau utang. Leverage adalah pinjaman modal atau utang yang digunakan untuk meningkatkan return atau keuntungan bagi suatu perusahaan maupun investasi. Pada akuntansi sektor publik, leverage ialah rasio untuk menentukan besar kecil suatu daerah bergantung ke kreditur dalam mendanai aset daerah mereka. Daerah dengan leverage tinggi, maka mereka cenderung memiliki kebergantungan ke pinjaman luar dalam mendanai aset. Hitungan rasio leverage bagi pemerintah berperan vital bagi kreditur maupun calon kreditur selama menentukan keputusan dalam memberikan kredit. Rasio ini hendak dipergunakan kreditur untuk menentukan kapabilitas pemerintah daerah dalam membayarkan utang mereka. Stewardship theory merupakan teori yang

menggambarkan suasana dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Teori stewardship dibangun atas dasar asumsi filosofi mengenai sifat manusia yakni pada hakekatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Implikasi teori dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewardship (pendapatan dan pengukuran) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam keefektifan PAD, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah dan juga leverage untuk dapat menghasilkan kinerja keuangan yang realistis.

Bastian, (2006) mendefinisikan bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Menurut A. Halim, (2012), "Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomidaerah". Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur menggunakan indikator keuangan.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan peundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2).

Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai

dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu. Dana ini bertujuan untuk pendanaan aktivitas khusus daerah tertentu yang sesuai dengan prioritas nasional. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan kepada daerah sesuai dengan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian Kuantitatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yakni : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Data yang dihasilkan merupakan hasil akhir dari proses pengelolaan selama penelitian, sumber data sendiri ialah segala hal yang dapat memberikan sebuah informasi tentang data. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Metode mengumpulkan data adalah cara yang dipergunakan peneliti dalam mengumpulkan data yang bersangkutan langsung bagi penelitiannya (Juliandi, 2014). Maka dari itu pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam suatu penelitian.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022). Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah organisasi sektor publik yaitu Seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. Sampel penelitian ini ialah data kinerja keuangan daerah pemerintah kota bandar lampung. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode Cluster Random Sampling.

Cluster random sampling merupakan teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi atau kabupaten. Kriteria dalam memilih sampel ini ialah sebagai berikut :

1. Kabupaten/Kota yang terdaftar sebagai wilayah di provinsi lampung.
2. Pada Tahun Penelitian 2020-2022.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Uji Regresi Linier Berganda**

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.025	.075		.328	.745
	PAD	6.910	.000	.602	2.480	.017
	Dana Perimbangan	4.206	.000	.092	.515	.034
	Ukuran Pemerintah Daerah	-5.725	.000	-.019	-.088	.931
	Leverage	-.074	.069	-.145	-1.063	.294

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber: data diolah SPSS, 2023

$$\text{Kinerja Keuangan Daerah} = 0,025 + 6,910\text{PAD} + 4,206\text{DP} - 5,725\text{UPD} - 0,074\text{L} + e$$

Berdasarkan hasil persamaan diatas terlihat bahwa:

1. Apabila nilai PAD, Dana Perimbangan, Ukuran pemerintah daerah dan leverage bersifat konstan ( $X_1, X_2, X_3, X_4 = 0$ ), maka tingkat kinerja keuangan daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,025.
2. Apabila nilai PAD ( $X_1$ ) dinaikan sebanyak 1x dengan dana perimbanganh, ukuran pemerintah daerah dan leverage bersifat konstan ( $X_2, X_3, X_4 = 0$ ), maka kinerja keuangan daerah (Y) akan meningkat sebesar 6,910.
3. Apabila nilai dana perimbangan ( $X_2$ ) dinaikan sebanyak 1x dengan PAD, ukuran pemerintah daerah dan leverage bersifat konstan ( $X_1, X_3, X_4 = 0$ ), maka kinerja keuangan daerah (Y) akan menurun sebesar 4,206.
4. Apabila nilai ukuran pemerintah daerah ( $X_3$ ) dinaikan sebanyak 1x dengan PAD, dana perimbangan dan leverage bersifat konstan ( $X_1, X_2, X_4 = 0$ ), maka kinerja keuangan daerah (Y) akan menurun sebesar 5,725
5. Apabila nilai leverage ( $X_4$ ) dinaikan sebanyak 1x dengan PAD, dana perimbangan dan ukuran pemerintah daerah bersifat konstan ( $X_1, X_2, X_3 = 0$ ), maka kinerja keuangan daerah (Y) akan menurun sebesar 0,074.

## Pengujian Hipotesis

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.656 <sup>a</sup>	.430	.734	.12780
a. Predictors: (Constant), Leverage, PAD, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah				
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah				

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui besarnya koefisien korelasi ganda pada kolom R sebesar 0,656. Koefisien determinasinya pada kolom *R Square* menunjukkan angka 0,430. Kolom *Adjusted R Square* merupakan koefisien determinasi yang telah dikoreksi yaitu sebesar 0,734 atau sebesar 73,4%, yang menunjukkan bahwa PAD, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah memberikan kontribusi terhadap tingkat kinerja keuangan daerah sebesar 73,4%, sedangkan sisanya 26,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Tabel 3. Hasil Uji Kelayakan Model (F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.494	4	.123	7.555	.012 <sup>b</sup>
	Residual	.653	40	.016		
	Total	1.147	44			
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah						
b. Predictors: (Constant), Leverage, PAD, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah						

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pengujian ini diperoleh hasil koefisien signifikan menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar  $0,012 < 0,05$  dengan nilai F hitung sebesar 7,555. Artinya bahwa secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis (t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.025	.075		.328	.745
	PAD	6.910	.000	.602	2.480	.017
	Dana Perimbangan	4.206	.000	.092	.515	.034
	Ukuran Pemerintah Daerah	-5.725	.000	-.019	-.088	.931
	Leverage	-.074	.069	-.145	-1.063	.294

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Dari tabel diatas terdapat ringkasan hasil pengujian keempat hipotesis yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil untuk variabel PAD (X1) menunjukkan bahwa dengan signifikan  $0,017 < 0.05$  maka jawaban hipotesis yaitu Ha1 diterima dan menolak Ho1 yang menyatakan bahwa Terdapat Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
2. Hasil untuk variabel Dana Perimbangan (X2) menunjukkan bahwa dengan signifikan  $0,034 < 0.05$  maka jawaban hipotesis yaitu Ha2 diterima dan menolak Ho2 yang menyatakan bahwa Terdapat Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
3. Hasil untuk variabel Ukuran Pemerintah Daerah (X3) menunjukkan bahwa dengan signifikan  $0,931 > 0.05$  maka jawaban hipotesis yaitu Ha3 ditolak dan menerima Ho3 yang menyatakan bahwa Tidak Terdapat Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
4. Hasil untuk variabel Leverage (X4) menunjukkan bahwa dengan signifikan  $0,294 > 0.05$  maka jawaban hipotesis yaitu Ha4 ditolak dan menerima Ho4 yang menyatakan bahwa Tidak Terdapat Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

## Pembahasan

### Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Koefisien penelitian yang bernilai positif dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka kinerja keuangan daerah akan semakin naik. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan

bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Penurunan PAD akan menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah. Begitu juga sebaliknya, peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai daerah akan meningkatkan PAD sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah tidak terhambat (Hamara, 2010). Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa penelitian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

#### **Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Koefisien penelitian yang bernilai positif dapat diartikan bahwa semakin tinggi dana perimbangan maka kinerja keuangan daerah akan semakin naik. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Dana Perimbangan khususnya DAU juga mempunyai peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dalam memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2010). Penelitian Rukmana (2013) hasil Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan, sedangkan Dana Perimbangan dan Retribusi Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan. Membuktikan semakin kecil dana perimbangan yang diberikan maka akan menunjukkan kinerja keuangan semakin baik, sebaliknya semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah semakin turun.

#### **Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Koefisien penelitian yang bernilai positif dapat diartikan bahwa semakin tinggi

ukuran pemerintah daerah maka kinerja keuangan daerah akan semakin turun. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas. Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan kinerja keuangan. Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya. Penelitian Sumarjo (2017), menggunakan ukuran pemerintah daerah yang di proksikan dengan total aset. Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh PAD guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja.

### **Pengaruh Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Koefisien penelitian yang bernilai positif dapat diartikan bahwa semakin tinggi leverage maka kinerja keuangan daerah akan semakin naik. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Leverage artinya pinjaman modal atau utang. Leverage adalah pinjaman modal atau utang yang digunakan untuk meningkatkan return atau keuntungan bagi suatu perusahaan maupun investasi. Debt to Equity Ratio (DER) atau rasio utang terhadap modal digunakan untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki daerah terbebani oleh utang dengan cara membandingkan antara total utang daerah dengan total aset daerah. Hasil yang didapat akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang (Sumarjo, 2017). Semakin tinggi leverage yang dimiliki maka dikatakan semakin buruk kinerja keuangan daerah. Artinya daerah tersebut belum mampu membiayai operasionalnya sendiri sehingga membutuhkan dana pinjaman dari pihak eksternal.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah dan leverage terhadap kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah di proksikan dengan rasio kemandirian. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa data kinerja keuangan

daerah. Metode analisis data menggunakan uji regresi linier berganda. Maka hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
3. Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
4. Leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. dan M. S. K. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Juliandi, A. (2014). *Metodologi penelitian Bisnis*. Umsu Pers.
- Lampung, B. P. S. P. (2021). *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2021*. Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2021. <https://lampung.bps.go.id/publication/2022/11/30/9970142efb4afcfedc822eb5/statistik-keuangan-daerah-provinsi-lampung-2021.html>
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.379>
- Sari, M. R. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Faktor Organisasional, Dan Penggunaan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 13(2), 117–141. <https://doi.org/10.21002/jaki.2016.07>
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. 2009. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2009. Jakarta: Salemba Empat.

**BIOGRAFI PENULIS**

	<p><b>Hilan Julianti</b> Mahasiswa Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, Indonesia, hilenjulianti023@gmail.com</p>
	<p><b>Fitri Agustina</b> <a href="https://scholar.google.co.id/citations?user=vBDGyGwAAAAJ&amp;hl=id">https://scholar.google.co.id/citations?user=vBDGyGwAAAAJ&amp;hl=id</a> Dosen Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, Indonesia, fitriagustina@darmajaya.ac.id</p>
	<p><b>Yaumil Khoiriyah</b> <a href="https://scholar.google.co.id/citations?user=o0hufVcAAAAJ&amp;hl=id">https://scholar.google.co.id/citations?user=o0hufVcAAAAJ&amp;hl=id</a> Dosen Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, Indonesia, yaumil@darmajaya.ac.id</p>